



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 4A /SEK/SK/II/2017

TENTANG

**PENETAPAN UNIT LAYANAN PENGADAAN  
KOORDINATOR WILAYAH PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN  
DI BAWAH MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 130 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagai lembaga yang memberikan pelayanan di bidang pengadaan barang/jasa pada 4 (empat) lingkungan peradilan pada masing-masing koordinator wilayah Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 agar pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dapat berjalan secara efektif

dan efisien, maka perlu dibentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) Koordinator Wilayah pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Koordinator Wilayah pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan pada masing-masing koordinator wilayah Mahkamah Agung Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
  5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  6. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

7. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;
11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
12. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 37/SEK/Peng.06.1/12/2015 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Peradilan Umum;
13. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 38/SEK/Peng.06.1/12/2015 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Peradilan Agama;

14. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 39/SEK/Peng.06.1/12/2015 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
15. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 40/SEK/Peng.06.1/12/2015 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Peradilan Militer;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG TENTANG PENETAPAN UNIT LAYANAN PENGADAAN KOORDINATOR WILAYAH PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN DI BAWAH MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.
- KESATU : Menetapkan dan menunjuk nama-nama dengan susunan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Susunan organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Koordinator Wilayah, terdiri dari:  
a. kepala;  
b. ketatausahaan/sekretariat; dan  
c. kelompok kerja.
- KETIGA : Unit Layanan Pengadaan (ULP) Koordinator Wilayah di 4 (empat) Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung mempunyai tugas:  
a. membentuk kelompok kerja sesuai kebutuhan;  
b. mengkaji ulang rencana umum pengadaan barang/jasa bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada 4 (empat) Lingkungan

Peradilan Mahkamah Agung;

- c. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung;
- d. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (*e-procurement*);
- e. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi;
- f. menjawab sanggahan;
- g. menyampaikan hasil pemilihan dan menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- h. mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Kerangka Acuan Kerja/ spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- i. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung kepada Pengguna Anggaran (PA) dan/atau laporan mengenai pelaksanaan tugas Unit Layanan Pengadaan (ULP);
- j. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran (PA);

- k. menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa, standar, sistem, dan prosedur pengadaan barang/jasa pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung;
- l. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung;
- m. mengelola sistem informasi manajemen pengadaan yang mencakup dokumen pengadaan, data survei harga, daftar kebutuhan barang/jasa dan daftar hitam penyedia barang/jasa; dan
- n. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia bidang pengadaan barang/jasa.

KEEMPAT

- : Ruang lingkup tugas Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Koordinator Wilayah, meliputi:
- a. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Unit Layanan Pengadaan (ULP);
  - b. menyusun dan melaksanakan strategi Pengadaan Barang/Jasa;
  - c. menyusun program kerja dan anggaran Unit Layanan Pengadaan (ULP);
  - d. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
  - e. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran (PA);
  - f. melaksanakan pengembangan dan pembinaan

sumber daya manusia di Unit Layanan Pengadaan (ULP);

- g. mengangkat dan memberhentikan anggota Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP);
- h. menugaskan anggota Kelompok Kerja (Pokja) sesuai dengan beban kerja masing-masing;
- i. mengangkat staf pendukung Unit Layanan Pengadaan (ULP) sesuai dengan kebutuhan; dan
- j. Kepala Unit Layanan Pengadaan dapat merangkap dan bertugas sebagai anggota Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP).

- KELIMA : Sekretariat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Koordinator Wilayah mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan dan rumah tangga;
  - b. melaksanakan fungsi ketatausahaan;
  - c. menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana kantor;
  - d. menyiapkan dokumen yang dibutuhkan Kelompok Kerja (Pokja) dalam pengadaan barang/jasa;
  - e. menyediakan dan mengelola sistem informasi yang digunakan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
  - f. melakukan sosialisasi kebijakan dan kegiatan pengadaan barang/jasa;
  - g. menyediakan informasi pengadaan barang/jasa kepada masyarakat;

- h. menerima dan mengkoordinasikan pengaduan dan sanggahan yang disampaikan oleh masyarakat;
- i. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap harga beli barang/jasa;
- j. melakukan koordinasi dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) terkait pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik (*e-procurement*);
- k. mengelola dokumen pengadaan barang/jasa;
- l. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan dan menyusun laporan;
- m. menyiapkan dan mengkoordinasikan tim teknis dan Staf Pendukung Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam proses pengadaan barang/jasa; dan
- n. Sekretaris Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan anggota dapat merangkap dan bertugas sebagai anggota Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP).

KEENAM : Pegawai Negeri yang ditugaskan di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Koordinator Wilayah sebagai pejabat/ pelaksana berhak menerima honorarium sepanjang anggaran tersedia, dengan besaran nominal dan mekanisme pembayaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

KETUJUH : Untuk paket pengadaan yang membutuhkan keahlian khusus, Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Koordinator Wilayah dapat menunjuk dan mengangkat tim ahli yang pakar dibidangnya.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 27 Februari 2017

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

A. S. PUDJOHARSOYO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
3. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
4. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI;
5. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
6. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BIRO PERLENGKAPAN  
BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD ASHAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS MA-RI  
NOMOR : 4A/SEK/SK/II/2017  
TANGGAL : 27 Februari 2017

UNIT LAYANAN PENGADAAN  
KOORDINATOR WILAYAH PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN  
DI BAWAH MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NO	NAMA	JABATAN ULP	JABATAN STRUKTURAL	KORWIL/ PROVINSI
1	Filizar, S.H., M.H.	Kepala	Sekretaris Pengadilan Tinggi Banda Aceh.	Aceh
	Mirza, S.H., M.H.	Sekretaris	Kabag Perencanaan dan Kepegawaian Mahkamah Syar'iyah Aceh.	
	T. Edi Johan, S.Kom	Anggota	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan PTUN Banda Aceh.	
	Marfiansyah	Anggota	Baban Sekretariat DILMIL I-01 Banda Aceh.	
	Miswardi, S.E.	Anggota	Staf Subbag Rencana Program dan Anggaran Pengadilan Tinggi Banda Aceh.	
2	Andi Baso Karim, S.H.	Kepala	Sekretaris Pengadilan Tinggi Medan.	Sumatera Utara
	H. Hilman Lubis, S.H., M.H.	Sekretaris	Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Medan.	
	T. Jansen, S.T., M.T.	Anggota	Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga Pengadilan Tinggi Medan.	
	M. Syahrur Rahman, S.H., M.H.	Anggota	Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga Pengadilan Tinggi Agama Medan.	
	Deffrin R. Girsang, S.T.	Anggota	Kepala Subbag Tata Usaha dan Rumah Tangga DILMILTI-I Medan.	

NO	NAMA	JABATAN ULP	JABATAN STRUKTURAL	KORWIL/ PROVINSI
3	Maiyefi, S.E., M.Si	Kepala	Sekretaris Pengadilan Tinggi Pekanbaru.	Riau
	Yohan Fauzi Yulises, S.Ag., M.H.	Sekretaris	Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.	
	Juni Dwianti, S.Si., M.H.	Anggota	Kasubbag Rencana Program dan Anggaran Pengadilan Tinggi Pekanbaru.	
	Rini Fitri, S.E.	Anggota	Staf Subbag Rencana Program dan Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.	
	Rioco Hendra, S.Kom., S.H.	Anggota	Staf Subbag Rencana Program dan Anggaran Pengadilan Tinggi Pekanbaru.	
4	Catur Sulasdiarso, S.Sos., M.Si	Kepala	Sekretaris Pengadilan Tinggi Padang.	Sumatera Barat
	Irsyadi, S.Ag., M.Ag	Sekretaris	Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Padang.	
	T. Yudianto SN, S.IP	Anggota	Kabag Perencanaan dan Kepegawaian Pengadilan Tinggi Padang.	
	Mukhlis, S.H.	Anggota	Kasubag Umum dan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Padang.	
	Baratha Jaya, S.Kom., S.H., M.Kom	Anggota	Staf Subbag Rumah Tangga dan Tata Laksana Pengadilan Tinggi Padang.	
5	H. Idris, S.H., M.H.	Kepala	Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Jambi.	Jambi
	Nur Ikhlas, S.E., Ak.	Sekretaris	Kabag Umum dan Keuangan Pengadilan Tinggi Jambi.	
	Drs. Jumaani Soleh	Anggota	Kabag Umum dan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Jambi.	
	Ade Chandra, S.H.	Anggota	Staf Subbag Tata Usaha dan Rumah Tangga Pengadilan Tinggi Jambi.	
	Muthiya Sari, S.Sos	Anggota	Staf Subbag Tata Usaha dan Rumah Tangga Pengadilan Tinggi Agama Jambi.	

NO	NAMA	JABATAN ULP	JABATAN STRUKTURAL	KORWIL/PROVINSI
6	Drs. Edison, M.A.	Kepala	Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Palembang.	Sumatera Selatan
	Vivi Yulianita, S.E., S.H., M.M.	Sekretaris	Sekretaris Pengadilan Tinggi Palembang.	
	Mardian Haryadi, S.Kom., S.H.	Anggota	Staf Subbag Keuangan dan Pelaporan Pengadilan Tinggi Agama Palembang.	
	Aas Sunarsih, S.H.	Anggota	Staf Subbag Keuangan dan Pelaporan Pengadilan Tinggi Palembang.	
	Miftah Nurul Anwar, S.H.	Anggota	Staf Subbag Perencanaan dan Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Palembang.	
7	Hermansyah, S.E	Kepala	Sekretaris Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.	Lampung
	Ujang Solihin, S.Ag., M.H., M.M.	Sekretaris	Kabag Umum dan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.	
	M. Tayib, S.E., S.H.	Anggota	Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung.	
	Arry Rizka, S.T., M.M.	Anggota	Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.	
	Efri Indrawan, A.Md	Anggota	Staf Subbag Tata Usaha dan Rumah Tangga Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.	
8	Aziz Falahudin, S.H., M.H.	Kepala	Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung.	Bangka Belitung
	Ridarto, S.H., M.Si	Sekretaris	Sekretaris Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	
	Yetti Iriany Siregar, S.H.	Anggota	Kabag Umum dan Keuangan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.	
	Samson Nahar, S.Ag., M.H.	Anggota	Kabag Umum dan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung.	

NO	NAMA	JABATAN ULP	JABATAN STRUKTURAL	KORWIL/ PROVINSI
	Sevia Dwi Krisnawaty, S.Akt., M.M.	Anggota	Staf Subbag Tata Usaha dan Rumah Tangga Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.	
9	Wansurni, S.E.,	Kepala	Sekretaris Pengadilan Tinggi Bengkulu.	Bengkulu
	Hendriansyah, S.H., M.H.	Sekretaris	Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu.	
	M. Ali El Fahmi, S.T.	Anggota	Kasubag Kepegawaian dan Teknologi Informasi Pengadilan Tinggi Bengkulu.	
	Wahfi Zuli, S.E.	Anggota	Staf Subbag Rencana Program dan Anggaran Pengadilan Tinggi Bengkulu.	
	Willcovin Alwintara D	Anggota	Staf Subbag Rencana Program dan Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu.	
10	Sudiyanto, S.H., M.H.	Kepala	Sekretaris Pengadilan Tinggi Banten.	Banten
	H. Hamdani, S.E., M.M.	Sekretaris	Kabag Umum dan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Banten.	
	Teguh Bernowo, S.H., M.H.	Anggota	Kabag Umum dan Keuangan Pengadilan Tinggi Banten.	
	Moris Fernando H, S.H.	Anggota	Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Banten.	
	Ahmad Rifa' i, A.Md	Anggota	Staf Sub Kepaniteraan Hukum.	
11	Drs. Nasrulloh, M.Si	Kepala	Sekretaris Pengadilan Tinggi Jakarta.	DKI Jakarta
	Drs. H. Andi Kurniawan, M.M.	Sekretaris	Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.	
	Ahmad Saefudin, S.H., M.H.	Anggota	Sekretaris Pengadilan Tinggi TUN Jakarta.	
	Letkol Anwar, S.H., M.H.	Anggota	Sekretaris DILMILTAMA.	
	Mayor Karsedi, S.H.	Anggota	Sekretaris DILMILTI II Jakarta.	

NO	NAMA	JABATAN ULP	JABATAN STRUKTURAL	KORWIL/PROVINSI
12	Drs. Ach Jufri, S.H., M.H.	Kepala	Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Bandung.	Jawa Barat
	Drs. Subarji, S.H.	Sekretaris	Sekretaris Pengadilan Tinggi Bandung.	
	Drs. Barnas, S.H.	Anggota	Kabag Perencanaan dan Kepegawaian Pengadilan Tinggi Bandung.	
	Rustandi, S.Ag	Anggota	Kabag Umum dan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Bandung.	
	Abdul Gaffar Muhtadi, S.HI.	Anggota	Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga Pengadilan Tinggi Agama Bandung.	
13	Sardiyono, S.E., M.Pd	Kepala	Sekretaris Pengadilan Tinggi Semarang.	Jawa Tengah
	Sutris, S.H., M.H.	Sekretaris	Kasubbag Rencana Program dan Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Semarang.	
	Ivan Raxy Tulandi	Anggota	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Salatiga.	
	Ahmadi, S.H.	Anggota	Staf Subbag Tata Usaha dan Rumah Tangga Pengadilan Tinggi Agama Semarang.	
	Afni Mufarlin, S.H.	Anggota	Staf Subbag Rencana Program dan Anggaran Pengadilan Tinggi Semarang.	
14	Karyarini Fatonah, S.H., M.M.	Kepala	Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.	Yogyakarta
	Sagimin, S.H., M.M.	Sekretaris	Sekretaris Pengadilan Tinggi Yogyakarta.	
	Dewi Kurniasih, S.Kom.	Anggota	Staf Subbag Kepegawaian dan Teknologi Informasi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.	
	Hidayat Sasangka, S.Kom	Anggota	Fungsional Pranata Komputer Pertama Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.	

NO	NAMA	JABATAN ULP	JABATAN STRUKTURAL	KORWIL/ PROVINSI
	Lutfiningrum Nur Afiyah, S.E., MBA	Anggota	Staf Subbag Keuangan dan Pelaporan Pengadilan Tinggi Yogyakarta	
15	Tjahyono, S.H.	Kepala	Sekretaris Pengadilan Tinggi Surabaya.	Jawa Timur
	Mokhammad Kodi, S.H.	Sekretaris	Kabag Perencanaan dan Kepegawaian Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.	
	H. Agustam Effendi, S.H., M.H.	Anggota	Sekretaris Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.	
	Nirwan Said, S.H.	Anggota	Sekretaris Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.	
	Diah Wahyu SN, A.Md	Anggota	Staf Subbag Keuangan dan Pelaporan Pengadilan Tinggi Surabaya.	
16	Drs. Tajudin Nur, S.H.	Kepala	Sekretaris Pengadilan Tinggi Pontianak.	Kalimantan Barat
	Naffi, S.Ag., M.H.	Sekretaris	Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.	
	Abd. Muthalib, S.H.	Anggota	Kepala Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.	
	Shanty Hermawati, S.T.	Anggota	Kasubbag Rencana Program dan Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.	
	Samza Januardi, S.T.	Anggota	Staf Subbag Keuangan dan Pelaporan Pengadilan Tinggi Pontianak.	
17	Abdul Khamid, S.H., M.H.	Kepala	Sekretaris Pengadilan Tinggi Palangkaraya	Kalimantan Tengah
	Mukti Ali, S.Ag., M.H.	Sekretaris	Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya	
	Faisal Sru Bramantyo, S.E.	Anggota	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Pengadilan Tinggi Palangkaraya	

NO	NAMA	JABATAN ULP	JABATAN STRUKTURAL	KORWIL/PROVINSI
	Norrachmad Ariyanto, S.T.	Anggota	Pengadministrasi Anggaran pada Subbag Rencana Program dan Anggaran.	
	Sutarno, S.Kom	Anggota	Pelaksana pada Subbag Kepegawaian dan Teknologi Informasi.	
18	H. Murtaji, S.E., S.H, M.H.	Kepala	Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.	Kalimantan Timur
	Drs. Yusrizal, M.H.	Sekretaris	Sekretaris Pengadilan Tinggi Samarinda.	
	Hernawan, S.H.	Anggota	Pengadministrasi Keuangan dan Pelaporan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.	
	Agus Johan Rahmatullah, S.HI.	Anggota	Pengadministrasi Keuangan dan Pelaporan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.	
	Mulia Rahman	Anggota	Pengadministrasi Tata Laksana dan Rumah Tangga Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.	
19	Drs. Sugiarto	Kepala	Sekretaris Pengadilan Tinggi Banjarmasin.	Kalimantan Selatan
	H. Saifuddin, S.H., M.H.	Sekretaris	Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.	
	Aulia Rahman, S.H., M.H.	Anggota	Kasubbag Rencana Program dan Anggaran Pengadilan Tinggi Banjarmasin.	
	H. Gt. M. Haris Hidayat, S.E.	Anggota	Staf Subbag Rencana Program dan Anggaran Pengadilan Tinggi Banjarmasin.	
	Agung Abdurrachman, S.E.	Anggota	Staf Subbag Rencana Program dan Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.	

NO	NAMA	JABATAN ULP	JABATAN STRUKTURAL	KORWIL/ PROVINSI
20	Drs. Darwis, M.Eng	Kepala	Sekretaris Pengadilan Tinggi Denpasar.	Bali
	Ni Made Yeni Widayani	Sekretaris	Kabag Perencanaan dan Kepegawaian Pengadilan Tinggi Denpasar.	
	Ni Wayan Suryani, S.E., S.H., M.H.	Anggota	Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga Pengadilan Tinggi Denpasar.	
	I Gede Kartika Aryasa, S.T.	Anggota	Pelaksana Subbag Kepegawaian dan Teknologi Informasi Pengadilan Tinggi Denpasar.	
	I Made Windra	Anggota	Pelaksana pada Subbag Keuangan dan Pelaporan Pengadilan Tinggi Denpasar.	
21	Misnudin, S.H., M.H.	Kepala	Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Mataram.	Nusa Tenggara Barat
	H. Mustafa, S.H.	Sekretaris	Sekretaris Pengadilan Tinggi Mataram.	
	Ahmad Yamani, S.H.	Anggota	Staf Subbag Tata Usaha dan Rumah Tangga Pengadilan Tinggi Mataram.	
	Tatang Winarto, S.Kom	Anggota	Staf Subbag Tata Usaha Rencana Program dan Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Mataram.	
	Suwardiman, S.Pd., S.H., M.Ak	Anggota	Staf Subbag Rencana Program dan Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Mataram.	
22	Bahrudin, A.Md., S.H., M.H.	Kepala	Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Kupang.	Nusa Tenggara Timur
	Johanis Lulu, S.H.	Sekretaris	Kepala Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tinggi Kupang.	
	Ali Amran, S.H., S.HI., M.H.	Anggota	Kepala Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Kupang.	

NO	NAMA	JABATAN ULP	JABATAN STRUKTURAL	KORWIL/ PROVINSI
	Daniel Neka, S.H.	Anggota	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Pengadilan Tinggi Kupang.	
	Trimo, S.H., M.H.	Anggota	Kepala Subbag Keuangan dan Pelaporan Pengadilan Tinggi Agama Kupang.	
23	Respationo Wage Suwardi, S.H., M.M	Kepala	Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar.	Sulawesi Selatan dan Barat
	Mardius Septiadi, S.H.	Sekretaris	Sekretaris Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar.	
	Hasanuddin R, S.T	Anggota	Kasubbag Rencana Program dan Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Makassar.	
	Evan Prayudha, S.Kom	Anggota	Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga Pengadilan Tinggi Makassar.	
	Bagiyo, S.H.	Anggota	Staf Subbag Umum dan Keuangan Pengadilan Militer III-16 Makassar.	
24	Iriani Soerijatje Susana Idrak, S.H.	Kepala	Sekretaris Pengadilan Tinggi Manado.	Sulawesi Utara
	H. Samsul Muhana, S.Ag., S.H., M.HI	Sekretaris	Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Manado.	
	Nurhayati Juriana Ulaen, S.H.	Anggota	Kabag Umum dan Keuangan Pengadilan Tinggi Manado.	
	Yahya, S.Ag., S.H.	Anggota	Kabag Perencanaan dan Kepegawaian Pengadilan Tinggi Manado.	
	Dedy Irawan Moningka, S.Kom	Anggota	Kasubbag Kepegawaian dan Teknologi Informasi Pengadilan Tinggi Agama Manado.	
25	Harsono Hamzah, S.Ag	Kepala	Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo.	Gorontalo
	Armin Jahja, S.H.	Sekretaris	Sekretaris Pengadilan Tinggi Gorontalo.	
	Abdul Adjis Ismail, S.H.	Anggota	Kabag Umum dan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo.	

NO	NAMA	JABATAN ULP	JABATAN STRUKTURAL	KORWIL/ PROVINSI
	Rusli Permana, A.Md	Anggota	Staf Kepegawaian dan Teknologi Informasi Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo.	
	Zulham Djafar	Anggota	Staf Tata Usaha dan Rumah Tangga Pengadilan Tinggi Gorontalo.	
26	Drs. Hardipin, S.H.	Kepala	Sekretaris Pengadilan Tinggi Kendari.	Sulawesi Tenggara
	Drs. Zakir	Sekretaris	Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Kendari.	
	Drs. Rustan, M.HI.	Anggota	Kabag Perencanaan dan Kepegawaian Pengadilan Tinggi Agama Kendari.	
	Irmayanti Muchtar, S.H.	Anggota	Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga Pengadilan Tinggi Kendari.	
	M. Resky Bunggasi, S.H., M.H.	Anggota	Staf Subbag Tata Usaha dan Rumah Tangga Pengadilan Tinggi Kendari.	
27	Sutarno, S.H., M.H.	Kepala	Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Palu.	Sulawesi Tengah
	Dra. Rahma Lahude, S.H.	Sekretaris	Sekretaris Pengadilan Tinggi Palu.	
	Sunarto Mait, S.T., M.H.	Anggota	Sekretaris Pengadilan Negeri Parigi.	
	Agus Sukamto, S.Ag	Anggota	Kasubbag Rencana Program dan Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Palu.	
	Muh. Naim, S.HI	Anggota	Staf Subbag Rencana Program dan Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Palu.	
28	Ismail Dfinubun, S.Ag., M.H.	Kepala	Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Ambon.	Maluku
	Drs. Muhammad Ashar, M.H.	Sekretaris	Sekretaris Pengadilan Tinggi Ambon.	
	Samsudin Narahaubun, S.HI	Anggota	Staf Subbag Rencana dan Program Pengadilan Tinggi Agama Ambon.	
	Hasdin, S.H., M.H.	Anggota	Staf Subbag Rencana dan Program Pengadilan Tinggi Ambon.	

NO	NAMA	JABATAN ULP	JABATAN STRUKTURAL	KORWIL/ PROVINSI
	Meidiyanto, S.E.	Anggota	Staf Tata Usaha dan Rumah Tangga Pengadilan Tinggi Ambon.	
29	La Adin	Kepala	Kabag Umum dan Keuangan Pengadilan Tinggi Ternate.	Maluku Utara
	Fatimah Albaar, S.Ag., M.H.	Sekretaris	Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Ternate	
	Chairul Dahri. P. S.Kom	Anggota	Kasubbag Rencana Program dan Anggaran Pengadilan Tinggi Ternate.	
	Alimudin Boly, S.IP	Anggota	Staf Keuangan dan Pelaporan Pengadilan Tinggi Ternate.	
	Iksan Taher, A.Md	Anggota	Staf Keuangan dan Pelaporan Pengadilan Tinggi Ternate.	
30	Drs. Sutikno, M.H.	Kepala	Sekretaris Pengadilan Tinggi Jayapura.	Jayapura
	Kahar Fabanyo, S.H.	Sekretaris	Kabag Umum dan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura.	
	I Gusti Ketut Suarta	Anggota	Kabag Umum dan Keuangan Pengadilan Tinggi Jayapura.	
	Solihin, S.H.	Anggota	Staf Umum Pengadilan Tinggi Jayapura.	
	Darodji, S.H.	Anggota	Staf Umum Pengadilan Tinggi Agama Jayapura.	

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

A. S. PUDJOHARSOYO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BIRO PERLENGKAPAN  
BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD ASHAR